

PERAN INTERPERSONAL KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA DARUBIAH KABUPATEN BULUKUMBA

Andi Risma Jaya¹, Makmur Jaya², Irwan³

¹Universitas Indonesia Timur, Indonesia

²Universitas Indonesia Timur, Indonesia

³Institut Teknologi dan Kesehatan Tri Tunas Nasional, Indonesia

Correspondence: jayarisma29@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Sep 2th, 2026

Revised Sep 12th, 2026

Accepted Sep 17th, 2026

Keyword:

Village Head

Leadership;

Interpersonal Role;

Community

Empowerment; Village

Government; Darubiah

Village.

ABSTRACT

This study aims to analyze the interpersonal role of the Village Head in community empowerment in Darubiah Village, Bulukumba Regency. The research uses a qualitative approach with a descriptive type. The empirical data analyzed comes from research conducted in 2014, so the findings reflect interpersonal leadership practices during that period. The study involved five informants: the Village Head, Village Secretary, Head of the Village Unit/KUD, Head of the Village Consultative Body (BPD), and a community leader. Data was collected through interviews and documentation, then analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Data credibility was checked using source triangulation. The results show that the Village Head performs the interpersonal role through involvement in community activities and relationships with village officials and community leaders. However, there are differences in the informants' views regarding the consistency of the Village Head's presence and punctuality in certain activities. These findings indicate that the interpersonal role has been carried out but not yet fully optimally. This study provides an empirical picture of interpersonal leadership practices in the context of village community empowerment in 2014. The study's limitation lies in the scope of informants and the data period, so the results cannot be used to conclude the current condition of Darubiah Village.

PENDAHULUAN

Kepemimpinan desa dalam pemberdayaan masyarakat melibatkan lebih dari sekadar fungsi administratif; kepala desa berperan sebagai dinamisator, fasilitator, motivator, inovator, pelopor, dan stabilisator yang menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan proses pembangunan (Nasir, 2025). Dalam penelitian di Darmorpis, kepala desa menunjukkan kemampuan untuk memobilisasi partisipasi masyarakat melalui kolaborasi dengan pemimpin tradisional dan tokoh agama, yang menjadi kunci

keberhasilan program pembangunan (Iswahyudi et al., 2025). Selain itu, kepemimpinan reflektif yang diadopsi oleh kepala desa dapat menciptakan inovasi sosial yang memperkuat hubungan antarwarga dan meningkatkan kepercayaan dalam komunitas (Datusahlan et al., 2025). Di Roda, kepala desa berperan dalam merancang program pembangunan dan menjalin koordinasi dengan pihak eksternal, yang menunjukkan pentingnya kepemimpinan yang komunikatif dan responsif (Harapik et al., 2025). Penelitian di Sriwedari juga menekankan bahwa kepala desa berfungsi sebagai sumber inovasi dan penggerak inisiatif masyarakat, yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan melalui program pemberdayaan yang beragam (Agustin & Priyanti, 2020). Dengan demikian, kepemimpinan desa yang efektif tidak hanya berfokus pada administrasi, tetapi juga pada pengembangan kapasitas sosial dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan (Lestari, 2025).

Di lapangan, harapan bahwa kepala desa mampu menjalankan peran interpersonal secara optimal tidak selalu sejalan dengan kenyataan. Di Desa Darubiah, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, ditemukan indikasi bahwa keterlibatan kepala desa dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan belum sepenuhnya konsisten, sebagian kehadiran diwakilkan kepada perangkat desa, dan terdapat pula keterlambatan dalam menghadiri kegiatan yang melibatkan tokoh masyarakat. Kesenjangan antara idealnya peran interpersonal seorang pemimpin desa dengan realitas pelaksanaannya di lapangan inilah yang menjadi fenomena menarik untuk dikaji, karena berpotensi memengaruhi efektivitas proses pemberdayaan masyarakat setempat. Sekaligus mencerminkan tantangan yang lebih luas dalam kepemimpinan desa di Indonesia.

Penelitian oleh Fazry (2023) menunjukkan bahwa kepala desa sering kali tidak dapat menjalankan peran mereka secara optimal, dengan keterlibatan yang tidak konsisten dalam kegiatan masyarakat dan sering kali diwakilkan kepada perangkat desa. Keterlambatan dalam menghadiri acara yang melibatkan tokoh masyarakat juga menjadi masalah, yang berpotensi menghambat efektivitas pemberdayaan masyarakat (Harapik et al., 2025). Selain itu, faktor-faktor seperti sumber daya manusia yang terbatas, pendanaan yang tidak memadai, dan kurangnya partisipasi masyarakat turut berkontribusi pada lambatnya pelaksanaan program pembangunan (Meliyani et al., 2024); (Gea et al., 2023). Oleh karena itu, penting untuk memperkuat peran kepala desa melalui peningkatan komunikasi, partisipasi, dan dukungan dari pemerintah daerah agar dapat mencapai hasil yang lebih baik dalam pembangunan desa. Berangkat dari kesenjangan tersebut, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana peran interpersonal Kepala Desa Darubiah dijalankan dalam upaya pemberdayaan masyarakat, serta sejauh mana peran tersebut telah berjalan secara efektif dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan desa.

Kajian mengenai kepemimpinan kepala desa menunjukkan bahwa peran interpersonal kepala desa sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat, meskipun penelitian yang mendalami aspek ini masih terbatas. Beberapa studi, seperti yang dilakukan di Desa Mantimin dan Desa Roda, menekankan bahwa kepemimpinan yang komunikatif dan partisipatif

berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan kolaborasi dengan pihak eksternal (Ambarita et al., 2025); (Harapik et al., 2025). Selain itu, penelitian di Desa Mulyoharjo menunjukkan bahwa kepemimpinan demokratis dapat meningkatkan kapasitas masyarakat melalui program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi, meskipun tantangan seperti partisipasi generasi muda masih ada (Maharani & Tijan, 2025). Penelitian lain juga menyoroti pentingnya gaya kepemimpinan yang partisipatif dalam pengambilan keputusan dan pengembangan desa (Ramadhan et al., 2025); (Rumbruren & Mansawan, 2025). Sementara pada penelitian ini, secara spesifik mendalami peran interpersonal kepala desa khususnya dengan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi kasus di Desa Darubiah masih relatif terbatas. Hal ini menunjukkan adanya celah penelitian (*gap riset*) yang perlu diisi untuk memahami lebih dalam dimensi interpersonal kepemimpinan kepala desa dalam konteks lokal yang spesifik, seperti di Desa Darubiah ini.

Penelitian ini menawarkan kebaruan melalui analisis peran interpersonal kepala desa dalam konteks spesifik Desa Darubiah, Kabupaten Bulukumba dengan menghadirkan data primer dari wawancara langsung terhadap kepala desa, perangkat desa, dan tokoh masyarakat di Desa Darubiah, sehingga memberikan gambaran kontekstual yang belum banyak diungkap dalam penelitian sejenis. Berbeda dari beberapa kajian sebelumnya yang membahas kepemimpinan desa atau tata kelola partisipatif secara umum, penelitian ini memusatkan perhatian pada kepala desa sebagai pemerintah dalam melakukan pemberdayaan masyarakat setempat. penelitian ini penting mengingat efektivitas peran interpersonal kepala desa berkontribusi langsung terhadap keberhasilan program pemberdayaan masyarakat, keharmonisan relasi antara pemimpin dan warga, serta keberlanjutan pembangunan desa secara partisipatif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan evaluatif bagi kepala desa serta pemangku kebijakan dalam memperkuat pola kepemimpinan berbasis hubungan interpersonal di tingkat desa.

Perlu ditegaskan bahwa penelitian ini menggunakan data yang dihimpun pada tahun 2014 untuk mengkaji peran interpersonal Kepala Desa Darubiah dalam pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, fenomena mengenai keterlibatan kepala desa, pola pendelegasian tugas, komunikasi interpersonal, dan ketepatan waktu yang dibahas dalam penelitian ini merujuk pada konteks sosial dan pemerintahan desa pada periode tersebut. Penegasan temporal ini penting agar temuan penelitian dipahami secara proporsional sebagai gambaran empiris pada waktu penelitian dilakukan, bukan sebagai representasi langsung kondisi pemerintahan Desa Darubiah pada saat artikel ini dipublikasikan. Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis praktik kepemimpinan interpersonal kepala desa sebagaimana terekam dalam data tahun 2014, sekaligus memberikan pemahaman mengenai hubungan interpersonal sebagai salah satu aspek penting dalam proses pemberdayaan masyarakat desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai peran interpersonal Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Darubiah, Kabupaten Bulukumba. Data empiris yang dianalisis dalam penelitian ini merupakan data penelitian tahun 2014, sehingga temuan yang dihasilkan menggambarkan kondisi dan praktik kepemimpinan interpersonal pada periode tersebut, bukan kondisi terkini. Penelitian ini melibatkan lima informan yang dipilih berdasarkan keterkaitan mereka dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kegiatan pemberdayaan masyarakat, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua Unit Desa/KUD, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan tokoh masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan peran interpersonal Kepala Desa dalam berinteraksi, berkomunikasi, serta membangun hubungan dengan perangkat desa dan masyarakat.

Data dianalisis secara deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi serta memusatkan perhatian pada informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis untuk mengidentifikasi pola dan perbedaan pandangan antar-informan. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan hasil interpretasi data. Untuk menjaga kredibilitas temuan, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan. Mengingat data yang dianalisis berasal dari tahun 2014, interpretasi hasil penelitian dibatasi pada konteks waktu tersebut. Penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data longitudinal maupun verifikasi lapangan terkini, sehingga hasilnya tidak dimaksudkan untuk menggambarkan perubahan atau perkembangan praktik kepemimpinan interpersonal Kepala Desa Darubiah setelah periode penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

Hasil penelitian yang disajikan dalam bagian ini bersumber dari data penelitian tahun 2014 yang diperoleh melalui wawancara terhadap lima informan, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua Unit Desa (KUD), Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan tokoh masyarakat. Data tersebut digunakan untuk menggambarkan praktik peran interpersonal Kepala Desa Darubiah dalam konteks pemberdayaan masyarakat pada periode penelitian. Oleh karena itu, uraian mengenai pola kehadiran kepala desa, pendelegasian kegiatan, keteladanan, serta perbedaan persepsi antar-informan harus dipahami sebagai temuan historis yang merefleksikan situasi pada tahun 2014. Analisis berikut tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan bahwa pola kepemimpinan tersebut masih berlangsung dalam bentuk yang sama pada saat artikel ini dipublikasikan.

Kehadiran kepala desa Darubiah dalam berbagai forum sosial bukan sekadar formalitas seremonial, melainkan instrumen strategis untuk membangun modal sosial dan legitimasi kepemimpinan di tingkat akar

rumput. Untuk menelusuri bagaimana peran tersebut dijalankan oleh Kepala Desa Darubiah, peneliti menghimpun keterangan dari lima informan yang memiliki posisi berbeda dalam struktur sosial dan pemerintahan desa, yakni Kepala Desa sendiri, Sekretaris Desa, Ketua Unit Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, dan seorang Tokoh Masyarakat. Kelima penuturan tersebut selanjutnya dirangkai dan didialogkan satu samalain agar diperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai konsistensi maupun kesenjangan persepsi antaraktor.

Untuk mengetahui peranan Kepala Desa sebagai interpersonal maka peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Darubiah Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba sendiri, Ia mengatakan bahwa:

“Saya selalu menghadiri setiap acara yang di lakukan oleh masyarakat, baik acara keluarga maupun acara lainnya yang dilakukan oleh masyarakat. Kehadiran saya sebagai bentuk kepedulian dan keteladanan bagi masyarakat selaku pimpinan. Akan tetapi untuk acara didalam desa saya sendiri yang menghadirinya akan tetapi menghadiri acara resmi diluar desa semua diserahkan kepada Sekertaris Desa”.

Pernyataan Kepala Desa (KD) di atas memperlihatkan pembagian peran yang cukup terstruktur antara kehadiran personal untuk kegiatan di dalam desa dan pendelegasian kepada Sekretaris Desa untuk acara resmi di luar desa. Pola ini mengindikasikan adanya kesadaran manajerial mengenai keterbatasan waktu dan sumber daya, sekaligus upaya menjaga kehadiran simbolik di lingkungan internal desa. Namun demikian, klaim tersebut tidak dapat berdiri sendiri sebagai kebenaran tunggal. Perlu diuji melalui triangulasi dengan pandangan informan lain yang berada pada posisi berbeda dalam struktur pemerintahan desa, guna melihat apakah pola pendelegasian itu dipersepsikan secara sama oleh pihak yang menerima pendelegasian maupun oleh masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan.

Selanjutnya peranan kepala desa sebagai interpersonal maka peneliti melakukan wawancara Sekretaris Desa Darubiah Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba mengatakan bahwa:

“Kepala desa selalu menghadiri acara resmi maupun tidak resmi. Tetapi, khusus diluar desa, biasanya diwakili oleh saya selaku Sekretaris Desa sehingga kepala desa hanya menghadiri acara didalam desa saja”.

Pernyataan Sekretaris Desa di atas disandingkan dengan penuturan Kepala Desa sebelumnya, tampak titik temu yang signifikan, keduanya sepakat bahwa pembagian tugas kehadiran didasarkan pada lokasi kegiatan, yakni di dalam desa dihadiri langsung oleh kepala desa, sedangkan acara resmi di luar desa diwakilkan kepada sekretaris desa. Konsistensi narasi antara pemimpin dan bawahannya ini memperkuat validitas temuan bahwa pendelegasian bukanlah bentuk penghindaran tanggung jawab, melainkan strategi pembagian kerja yang telah disepakati bersama. Pola semacam ini sejalan dengan temuan Harapik et al. (2025) di Desa Roda, yang menunjukkan bahwa kepala desa yang komunikatif dan responsif cenderung membangun mekanisme koordinasi yang jelas dengan perangkat desa maupun pihak eksternal, sehingga tugas-tugas kepemimpinan tetap dapat

berjalan efektif meskipun tidak seluruhnya ditangani langsung oleh kepala desa.

Hal yang sama diungkapkan tentang peranan kepala desa sebagai interpersonal maka peneliti melakukan wawancara dengan ketua KUD Darubiah Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba mengatakan bahwa:

“Pimpinan dalam menghadiri acara didesa selalu datang, itu dilakukan untuk menjadikan pimpinan sebagai teladan bagi anggotanya dan juga acara yang biasa dilaksanakan didesa tidak begitu jauh jarak tempuhnya maka pimpinan datang sendiri tanpa diwakili oleh pihak pengurus desa lainnya”.

Suara Ketua Unit Desa (KUD) menambahkan dimensi baru dalam dialog temuan ini, yakni penekanan pada aspek keteladanan dan pertimbangan jarak tempuh sebagai faktor yang memengaruhi keputusan kepala desa untuk hadir secara langsung. Jika pernyataan Kepala Desa dan Sekretaris Desa lebih menonjolkan pembagian peran berdasarkan lokasi formal-informal, maka KUD memperkaya pemahaman tersebut dengan menyoroti motif di balik kehadiran, yaitu fungsi keteladanan bagi anggota masyarakat. Perspektif ini relevan dengan konsep kepemimpinan reflektif yang dikemukakan Datusahlan et al. (2025), yang menegaskan bahwa inovasi sosial dan penguatan hubungan antarwarga sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pemimpin mampu menampilkan diri sebagai figur yang dapat dicontoh, bukan sekadar figur struktural yang berjarak dari masyarakatnya.

Untuk mengetahui peranan kepala desa sebagai interpersonal maka peneliti melakukan wawancara KBPD Darubiah Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba mengatakan bahwa:

“Setiap ada acara untuk kegiatan yang berhubungan dengan pihak desa maka kepala desa selaku pimpinan desa setiap saat datang menghadiri acara itu baik itu secara resmi maupun tidak resmi akan tetapi biasanya acara resmi yang biasanya didatangi dan yang tidak resmi diwakili oleh pengurus desa”.

Keterangan dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) semakin menegaskan pola yang telah terbangun dari tiga penuturan sebelumnya, sekaligus memberikan nuansa tambahan berupa pembedaan antara acara resmi dan tidak resmi sebagai variabel penentu kehadiran. Keempat informan: Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua KUD dan Ketua KBPD secara konsisten menggambarkan pola kehadiran yang sama, dialog antartemuan ini menghasilkan kredibilitas data yang cukup kuat melalui triangulasi sumber. Kesamaan persepsi lintas informan ini menggambarkan bahwa budaya kepemimpinan partisipatif, sebagaimana ditekankan oleh Ambarita et al. (2025) dalam kajian mereka di Desa Mantimin, telah terbentuk sebagai norma bersama di lingkungan pemerintahan Desa Darubiah, di mana ekspektasi mengenai kehadiran pemimpin dipahami secara relatif seragam oleh unsur pemerintahan desa.

Selanjutnya peranan kepala desa sebagai interpersonal maka peneliti melakukan wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Darubiah Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba mengatakan bahwa:

“Kepala desa kami kebanyakan menyuruh anggota untuk menghadiri acara yang sifatnya resmi maupun tidak resmi, dan biasa terlambat datang apabil ada acara yang melibatkan tokoh masyarakat”.

Dialog temuan mengalami titik balik penting ketika pernyataan Tokoh Masyarakat dihadirkan sebagai pembanding. Berbeda dari empat informan sebelumnya yang berasal dari lingkaran internal pemerintahan desa, Tokoh Masyarakat tersebut merepresentasikan sudut pandang eksternal yang lebih dekat dengan pengalaman langsung masyarakat sebagai penerima manfaat kepemimpinan. Pernyataan Tokoh Masyarakat tersebut justru menyoroti kecenderungan kepala desa untuk menugaskan anggota atau perangkat menghadiri acara, baik resmi maupun tidak resmi, serta pola keterlambatan kehadiran pada acara yang melibatkan tokoh masyarakat. Kontradiksi persepsi ini antara narasi internal yang menekankan konsistensi kehadiran kepala desa dan narasi eksternal yang menyoroti pendelegasian yang lebih luas serta keterlambatan merupakan temuan penting yang tidak dapat diabaikan dalam kajian ini.

Fenomena semacam ini konsisten dengan hasil penelitian Fazry (2023) yang menemukan bahwa kepala desa kerap tidak dapat menjalankan perannya secara optimal, dengan keterlibatan yang tidak konsisten dan kecenderungan untuk mendelegasikan kehadiran kepada perangkat desa. Demikian pula, keterlambatan kehadiran pada acara yang melibatkan tokoh masyarakat, sebagaimana diperingatkan oleh Harapik et al (2025), berpotensi menghambat efektivitas proses pemberdayaan karena melemahkan kualitas relasi personal antara pemimpin dan basis sosial yang memiliki pengaruh signifikan di tingkat desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kepemimpinan desa tidak hanya ditentukan oleh kewenangan formal yang dimiliki kepala desa, tetapi juga oleh konsistensi kehadiran, keterlibatan langsung, komunikasi, dan kemampuan membangun hubungan sosial dengan masyarakat. Ketika aspek-aspek tersebut tidak berjalan secara optimal, proses pemberdayaan masyarakat berisiko menjadi kurang partisipatif, koordinasi antaraktor desa menjadi lemah, dan berbagai program pembangunan berpotensi tidak sepenuhnya merefleksikan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, fenomena ketidakkonsistenan keterlibatan kepala desa menjadi persoalan penting yang perlu dikaji lebih lanjut, terutama dalam memahami bagaimana praktik kepemimpinan di tingkat desa memengaruhi keberhasilan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.

2. Pembahasan

Peranan Kepala Desa sebagai Interpesonal merupakan peran yang dilakukan pimpinan dalam bentuk formal. Artinya kepala desa melakukan tugas dan kewajibannya dengan melakukan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, yakni dalam rangka memberdayakan masyarakat. Titik sentral hubungan interpersonal adalah manusia yang tidak lepas dalam hubungan dan interaksi dengan orang lain. Hubungan interpersonal mempunyai tujuan tertentu, yaitu untuk memelihara harmoni, saling mempengaruhi, mengubah sikap perilaku, dan sebagainya (Meutia & Dewi, 2017). Salah satu bentuk komunikasi adalah komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi yaitu komunikasi

antar dua orang dimana terjadi kontak langsung dalam bentuk percakapan, contoh: *face to face* atau melalui telepon. Ciri khas komunikasi pribadi adalah sifatnya “dua arah dan timbal balik”. Komunikasi interpersonal dilakukan seseorang untuk tujuan pribadi maupun kepentingan kelompok atau organisasi. Komunikasi interpersonal bentuknya bervariasi antara lain konsultasi, lobby, pertemuan empat mata, negosiasi, dan sebagainya.

Konsep peran interpersonal tersebut sejalan dengan kerangka peran manajerial yang menempatkan seorang pemimpin bukan sekadar sebagai pengambil kebijakan administratif, melainkan juga sebagai simbol keteladanan (*figurehead*), penghubung (*liaison*), sekaligus penggerak (*leader*) (JERI, 2025). Kehadiran Kepala Desa secara fisik maupun sosial turut menentukan derajat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan desa (Saputra et al., 2025). Dalam konteks Desa Darubiah, peran ini menjadi krusial mengingat proses pemberdayaan masyarakat sangat bergantung pada intensitas interaksi tatap muka antara kepala desa dengan warga, tokoh adat, dan tokoh agama, sebagaimana ditemukan pula pada kepemimpinan di Kampung Darmorpis yang berhasil memobilisasi partisipasi warga melalui kolaborasi dengan pemimpin tradisional dan tokoh agama (Iswahyudi Iswahyudi et al., 2025).

Berdasarkan hasil penelitian dari kelima penuturan informan dalam bentuk wawancara tersebut dapat ditarik benang merah bahwa terdapat dua lapisan realitas yang berjalan secara paralel dalam praktik kepemimpinan interpersonal Kepala Desa Darubiah. *Lapisan pertama* adalah realitas struktural-internal yang direpresentasikan oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang secara kompak menggambarkan pola kehadiran yang terorganisir dan berorientasi pada keteladanan. *Lapisan kedua* adalah realitas sosial-eksternal yang direpresentasikan oleh Tokoh Masyarakat, yang justru menyoroti kesenjangan antara idealitas kehadiran tersebut dengan pengalaman nyata masyarakat, khususnya terkait ketepatan waktu dan intensitas keterlibatan langsung kepala desa. Kesenjangan semacam ini bukanlah hal yang asing dalam kajian kepemimpinan desa di Indonesia; sebagaimana dicatat oleh Meliyani et al. (2024), dalam penelitian di Desa Cemarajaya, gaya kepemimpinan yang dipersepsikan positif oleh unsur pemerintahan internal tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat partisipasi dan kepuasan masyarakat, terutama apabila komunikasi dan koordinasi dengan elemen masyarakat tidak berjalan optimal.

Dialog temuan juga mengungkapkan bahwa pendelegasian kehadiran kepada Sekretaris Desa maupun perangkat desa lainnya tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai kelalaian kepemimpinan. Sebagaimana ditegaskan berulang oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa, pendelegasian tersebut didasarkan pada pertimbangan efisiensi waktu dan jangkauan wilayah, khususnya untuk acara resmi yang berlangsung di luar desa. Pola ini sejalan dengan prinsip pembagian kerja dalam kepemimpinan modern, sebagaimana ditemukan pula dalam penelitian Gea et al. (2023) mengenai pengelolaan kerja sama kelembagaan di Pemerintahan Desa Tetehosi I, yang menunjukkan bahwa kepala desa yang efektif adalah kepala desa yang mampu mendistribusikan tugas kepada perangkat tanpa kehilangan kendali

atas capaian program secara keseluruhan. Akan tetapi, dialog ini juga menyisakan pertanyaan kritis: sejauh mana batas ideal antara pendelegasian yang strategis dan pendelegasian yang justru mereduksi kualitas hubungan interpersonal antara pemimpin dan warganya? Pertanyaan ini menjadi relevan mengingat pernyataan Tokoh Masyarakat yang menyebut kecenderungan kepala desa untuk “menyuruh anggota” menghadiri acara, sebuah frasa yang berkonotasi lebih pasif dibandingkan dengan narasi pendelegasian yang disepakati sebagaimana digambarkan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa.

Isu keterlambatan kehadiran kepala desa pada acara yang melibatkan tokoh masyarakat, sebagaimana disampaikan Tokoh Masyarakat, merupakan temuan yang layak mendapat perhatian khusus dalam pembahasan ini. Dalam perspektif komunikasi interpersonal, ketepatan waktu bukan sekadar persoalan teknis administratif, melainkan simbol penghormatan terhadap pihak lain dalam relasi sosial. Keterlambatan yang berulang berpotensi menggerus rasa hormat dan kepercayaan tokoh masyarakat terhadap kepemimpinan kepala desa, yang pada gilirannya dapat melemahkan efektivitas proses pemberdayaan yang sangat bergantung pada dukungan tokoh-tokoh kunci di tingkat lokal. Temuan ini memperkuat argumen Harapik et al. (2025) bahwa kepemimpinan yang komunikatif dan responsif menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan program pembangunan desa, sekaligus menegaskan peringatan Fazry (2023) bahwa inkonsistensi keterlibatan kepala desa dalam kegiatan kemasyarakatan berpotensi menghambat efektivitas pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian dapat dimaknai melalui lensa modal sosial dalam kepemimpinan desa bahwa kehadiran kepala desa dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan terlepas dari sebagian pendelegasian dan keterlambatan yang terjadi tetap berfungsi sebagai mekanisme akumulasi modal sosial, sebagaimana ditekankan dalam kajian Datusahlan et al., (2025) tentang kepemimpinan reflektif dan inovasi sosial di tingkat pemerintahan desa. Modal sosial ini terbangun melalui pengulangan interaksi tatap muka yang relatif konsisten, meskipun tidak selalu sempurna dari segi ketepatan waktu maupun intensitas kehadiran personal. Senada dengan itu, penelitian Lestari (2025) mengenai kepemimpinan strategis kepala desa dalam pengembangan desa wisata berkelanjutan menegaskan bahwa efektivitas kepemimpinan desa tidak diukur semata dari kehadiran fisik, melainkan dari kemampuan pemimpin membangun jaringan relasi yang mendukung keberlanjutan program pemberdayaan, termasuk melalui pendelegasian yang tepat sasaran. Hal serupa juga tergambar dalam penelitian Ramadhan et al. (2025) dan Rumbruren & Mansawan (2025), yang menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan partisipatif yang salah satu wujudnya adalah keterlibatan langsung dalam forum-forum kemasyarakatan berkontribusi signifikan terhadap kualitas pengambilan keputusan dan pengembangan desa secara berkelanjutan.

Hasil temuan mengenai peran interpersonal ini pada akhirnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan akhir penelitian, yaitu pemberdayaan masyarakat Desa Darubiah. Sebagaimana ditunjukkan oleh Agustin &

Priyanti (2020) di Desa Sriwedari, kepala desa yang berfungsi sebagai sumber inovasi dan penggerak inisiatif masyarakat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan melalui program pemberdayaan yang beragam. Pola kehadiran interpersonal yang konsisten meskipun diwarnai sejumlah keterbatasan seperti pendelegasian dan keterlambatan tetap menjadi fondasi awal yang memungkinkan terbukanya ruang komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Tanpa fondasi interpersonal yang memadai, program-program pemberdayaan ekonomi maupun sosial berisiko berjalan tanpa dukungan partisipasi yang memadai, sebagaimana diingatkan oleh Maharani & Tijan (2025) yang menemukan bahwa tantangan partisipasi, khususnya dari generasi muda, tetap muncul meskipun gaya kepemimpinan yang diterapkan sudah bersifat demokratis. Dengan demikian, dialog temuan wawancara dalam penelitian ini menegaskan bahwa peran interpersonal bukanlah jaminan tunggal keberhasilan pemberdayaan, melainkan fondasi relasional yang harus terus dijaga dan diperkuat agar proses pemberdayaan masyarakat di Desa Darubiah dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa peran kepala desa dalam melakukan perannya sebagai peran interpersonal, kepala berperan tidak begitu aktif apalagi dalam menghadiri acara kepala tetap hadir walaupun dalam hal itu kepala desa tidak tetap waktu dalam kedatangannya. Peran sebagai interpersonal sudah melakukan dengan baik itu dapat dilihat dengan berperannya kepala desa dalam setiap ada kegiatan baik acara resmi maupun tidak resmi selalu menghadiri karena dalam kehadiran kepala desa dapat dilihat sebagai teladan bagi masyarakatnya.

Dalam menginterpretasikan temuan penelitian ini, aspek temporal perlu menjadi pertimbangan penting. Seluruh temuan empiris yang dianalisis bersumber dari data tahun 2014 sehingga interpretasi mengenai hubungan interpersonal, keteladanan, pendelegasian tugas, dan keterlibatan kepala desa terbatas pada konteks penelitian tersebut. Perubahan kepemimpinan, dinamika sosial masyarakat, serta perkembangan tata kelola pemerintahan desa setelah periode penelitian tidak menjadi objek pengamatan dalam kajian ini. Oleh sebab itu, temuan penelitian lebih tepat diposisikan sebagai dokumentasi empiris mengenai praktik kepemimpinan interpersonal pada tahun 2014 yang dapat menjadi bahan refleksi dan pembandingan bagi penelitian selanjutnya. Penegasan ini juga menunjukkan pentingnya penelitian lanjutan untuk mengidentifikasi kemungkinan perubahan pola hubungan antara kepala desa dan masyarakat serta implikasinya terhadap pemberdayaan masyarakat dalam konteks pemerintahan desa saat ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data penelitian tahun 2014, dapat disimpulkan bahwa peran interpersonal Kepala Desa Darubiah dalam pemberdayaan masyarakat pada periode tersebut diwujudkan melalui keterlibatan dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, keteladanan, serta hubungan langsung dengan warga. Kehadiran kepala desa memiliki fungsi sosial dalam membangun komunikasi dan memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat. Keterangan dari Kepala Desa, Sekretaris

Desa, Ketua KUD, dan Ketua BPD menunjukkan adanya pola pembagian tugas, khususnya melalui pendelegasian kegiatan di luar desa kepada perangkat desa.

Namun, penelitian juga menemukan perbedaan persepsi antara unsur internal pemerintahan desa dan tokoh masyarakat mengenai intensitas kehadiran serta ketepatan waktu kepala desa. Jika informan internal menggambarkan pola kehadiran yang relatif terorganisasi, tokoh masyarakat menyoroti kecenderungan pendelegasian dan keterlambatan dalam kegiatan tertentu. Temuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan peran interpersonal pada periode penelitian masih menghadapi tantangan dalam hal konsistensi keterlibatan langsung dan pemeliharaan hubungan sosial dengan masyarakat.

Secara keseluruhan, berdasarkan data tahun 2014, peran interpersonal Kepala Desa Darubiah telah dijalankan, tetapi masih terdapat aspek yang perlu diperkuat, terutama komunikasi yang responsif, ketepatan waktu, dan keterlibatan langsung dengan masyarakat. Temuan ini memberikan gambaran kontekstual mengenai praktik kepemimpinan interpersonal dalam pemberdayaan masyarakat desa pada periode tersebut. Mengingat data penelitian berasal dari tahun 2014, kesimpulan ini tidak dapat secara langsung digunakan untuk menggambarkan kondisi pemerintahan Desa Darubiah saat ini. Penelitian lanjutan dengan pengumpulan data terkini diperlukan untuk mengetahui perkembangan praktik kepemimpinan interpersonal dan relevansinya terhadap pemberdayaan masyarakat pada masa sekarang.

KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki keterbatasan temporal karena data empiris yang dianalisis merupakan data penelitian tahun 2014. Dengan demikian, temuan yang diperoleh merepresentasikan praktik kepemimpinan interpersonal Kepala Desa Darubiah pada periode tersebut dan belum mencakup kemungkinan perubahan dalam struktur pemerintahan, pola komunikasi, maupun hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat setelah tahun 2014. Selain itu, penelitian melibatkan lima informan sehingga perspektif yang diperoleh terbatas pada pengalaman dan pandangan para informan tersebut. Penelitian ini juga tidak melakukan pengumpulan data longitudinal atau verifikasi lapangan terkini untuk menelusuri perkembangan praktik kepemimpinan interpersonal dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan melakukan studi lanjutan dengan data empiris terbaru, melibatkan lebih banyak unsur masyarakat, serta membandingkan temuan antarperiode guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika kepemimpinan interpersonal dan pemberdayaan masyarakat desa.

REFERENSI

Agustin, P. N., & Priyanti, E. (2020). Analisis Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Sriwedari Kecamatan Jaken Kabupaten Pati. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(21), 404–415. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.7288183>

- Ambarita, A. H., Suryadi, B., & Mahyuni, M. (2025). Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Balangan: Studi Kasus Desa Mantimin Kecamatan Batumandi. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 9(4), 2535–2545. <https://doi.org/10.31604/jim.v9i4.2025.2535-2545>
- Datusahlan, M., Naping, H., & Yahya. (2025). REFLECTIVE LEADERSHIP AND SOCIAL INNOVATION IN VILLAGE GOVERNANCE: AN AUTOETHNOGRAPHIC ANALYSIS THROUGH AGIL AND SOCIAL CAPITAL. *Lex Localis - Journal of Local Self-Government*, 23(S6), 1950–1959. <https://doi.org/10.52152/6apbq547>
- Fazry, M. (2023). PENGUATAN PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DI DESA AKETOBOLOLO KECAMATAN OBA TENGAH. *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 8(2), 226. <https://doi.org/10.58487/akrabjuara.v8i2.2104>
- Gea, R., Ndraha, A. B., Mendrofa, Y., & Waruwu, S. (2023). PERAN KEPALA DESA DALAM MENGELOLA KERJASAMA KELEMBAGAAN DI PEMERINTAHAN DESA TETEHOSI I KOTA GUNUNGSITOLI. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 10(3), 2307–2321. <https://doi.org/10.35794/jmbi.v10i3.54206>
- Harapik, Wahyuddin, Ulfah Attamimi, & Riston G Ahmad. (2025). KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN DI DESA RODA KECAMATAN KOLONO KABUPATEN KONawe SELATAN. *Journal Publicuho*, 8(3), 2089–2102. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v8i3.937>
- Iswahyudi Iswahyudi, Agustina, A., Asmadianto Asmadianto, & Edyanto, E. (2025). Peran Kepala Dalam Meningkatkan Pembangunan Kampung Darmorpis Darfuar Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hukum*, 2(2), 90–96. <https://doi.org/10.62383/prosemnashuk.v2i2.63>
- JERI, Y. (2025). PERAN MANAJERIAL KEPALA MADRASAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIK DI MTS AL KHAIRIYAH KALIAWI BANDAR LAMPUNG. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Lestari, S. (2025). Strategic Leadership Strategies of Village Heads in Driving Sustainable Tourism Village Development. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP)*, 7(2), 184–192. <https://doi.org/10.33474/jisop.v7i2.23845>
- Maharani, H., & Tijan, T. (2025). Village Head Leadership in the Implementation of the Carved Furniture Community Empowerment Program in Mulyoharjo Village in 2024. *POLICY LAW NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI)*, 4(4), 516–527. <https://doi.org/10.55047/polri.v4i4.1803>
- Meliyani, Wanta, & Dwi Epty Hidayaty. (2024). Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa: Studi pada Desa Cemarajaya. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(9), 5523–5534. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i9.2463>
- Meutia, C., & Dewi, S. S. (2017). Hubungan antara Komunikasi Interpersonal dengan Keharmonisan Keluarga pada Istri yang Bekerja sebagai

Karyawan di Kecamatan Medan Petisah.

- Nasir, N. (2025). Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Cambajawaya Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar. *JMIK: Jurnal Manajemen Dan Inovasi Kewirausahaan*, 1(3), 140–152. <https://doi.org/10.64532/dj21h203>
- Ramadhan, N., Nuraeni, I., & Khotimah, N. (2025). Analysis of Village Head Leadership Styles. *Journal of Law and Administrative Science*, 3(2), 30–39. <https://doi.org/10.33478/jlas.v3i2.42>
- Rumbruren, A. H., & Mansawan, I. S. K. (2025). Peran Kepala Kampung dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Simpyongbud Distrik Anggi Gida Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua. *Jurnal Paradoks Hukum*, 1(1), 28–58. <https://doi.org/10.64147/dokhum.v1i1.2>
- Saputra, F. I. J., Suryani, E. I., & Sari, T. M. (2025). Peran Kepala Desa dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Srimulya Jaya Kecamatan Seputih Surabaya Lampung Tengah. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(3), 3569–3577. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i3.1727>
-

Copyright Holder :

© Andi Risma Jaya, Makmur Jaya, Irwan (2026).

First Publication Right :

© Abqary (*Journal of Law, Governance, and Sharia Studies*)

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>